

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu persoalan yang dihadapi setiap Negara didunia. Baik Negara maju maupun Negara berkembang. Setiap Negara didunia berlomba-lomba untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cerminan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan ketimpangan lainnya. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang pun tak luput dari permasalahan pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu setiap tahun pemerintah Indonesia selalu menjadikan pembangunan ekonomi sebagai bagian penting dari program pemerintah indonesia. Pembangunan ekonomi yang belum merata di Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan yang ada di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih baik mencapai target apabila didalamnya terdapat potensi yang dimiliki daerah tersebut. Seperti sumber daya manusia atau sumber daya alam.

Fakta yang ada kenyataannya menunjukkan bahwa perekonomian yang ada di Indonesia mewarisi sifat dari perekonomian yang menganut sifat dualistis seperti yang terdapat pada tesis yang dikemukakan oleh boeke yakni bahwa perekonomian Indonesia di bagi menjadi dua bagian yakni sektor

ekonomi modern yang didalamnya terdapat beberapa bagian (pertambangan, perkebunan, dan perindustrian besar) yang memiliki ciri padat modal dengan sektor tradisional yakni antara lain (pertanian, perdagangan kecil tradisional, dan kerajinan tangan). Perekonomian Indonesia dari era pasca kemerdekaan hingga sekarang masih menganut sifat dualistis dimana perusahaan asing dan perusahaan nasional, industri kecil dan industri besar, perkebunan besar dan perkebunan rakyat, akan dapat berjalan berdampingan (Yuliadi, 2007).

Pembangunan ekonomi seharusnya dapat dilaksanakan dengan selaras dan seimbang serta diharapkan dapat berkelanjutan karena diharapkan pembangunan yang dilakukan adalah bagian dari pembangunan nasional. Untuk melaksanakan proses pembangunan dalam tingkat ekonomi nasional diperlukan adanya pembangunan pada tingkat ekonomi daerah yang diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pada setiap daerah serta terciptanya pembangunan yang merata (Wijaya 2006). Salah satu indikator yang menjadi alat ukur dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi, karena variabel pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara kuantitatif. Ekonomi dikatakan tumbuh apabila terjadi kenaikan pada pendapatan (total maupun individu) sehingga dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto dengan mengesampingkan kenaikan yang terjadi pada bertambahnya jumlah penduduk (Murdiono, 2014). Tujuan pembangunan ekonomi salah satunya adalah untuk menciptakan modal yang kuat sehingga dapat meningkatkan hasil dalam bidang perkebunan, industri,

pertanian dan pertambangan. Karena modal akan digunakan untuk mendirikan berbagai macam fasilitas umum disuatu daerah antara lain adanya gedung sekolah, tempat ibadah, gedung rumah sakit, akses jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya Jhingan (1992).

Menurut Tambunan (2012), pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pada suatu daerah serta prosesnya akan saling berkaitan yang kemudian akan berjalan secara terus menerus setiap tahunnya adalah kondisi yang paling utama dalam kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan penduduk yang akan mengalami peningkatan di setiap tahunnya atau kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah sehingga diperlukan adanya penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat diperoleh dengan adanya peningkatan barang dan jasa atau PDRB setiap tahunnya. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Output yang akan dihasilkan berupa kesejahteraan masyarakat dan potensi daerah yang ada akan meningkat secara maksimal. Oleh karena itu PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mencapai target pembangunan ekonomi.

Pembangunan pada daerah merupakan sesuatu yang menyatu dengan pembangunan yang dilakukan pada tingkat nasional. Pembangunan ekonomi yang dilakukan seharusnya dapat dilaksanakan dengan sebesar-besarnya demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi seharusnya dapat memberikan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh

masyarakat, bukan hanya kepada sebagian masyarakat saja (Saputra 2016). Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat tercermin dari pembangunan yang dilakukan oleh daerah tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dapat merubah struktur ekonomi pada daerah, yang outputnya diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat (Hasaniyah 2016). Salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah adalah bagaimana daerah tersebut mampu untuk mengidentifikasi setiap potensi yang ada pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah untuk keberhasilan pembangunan ekonomi (Iswanto, 2015).

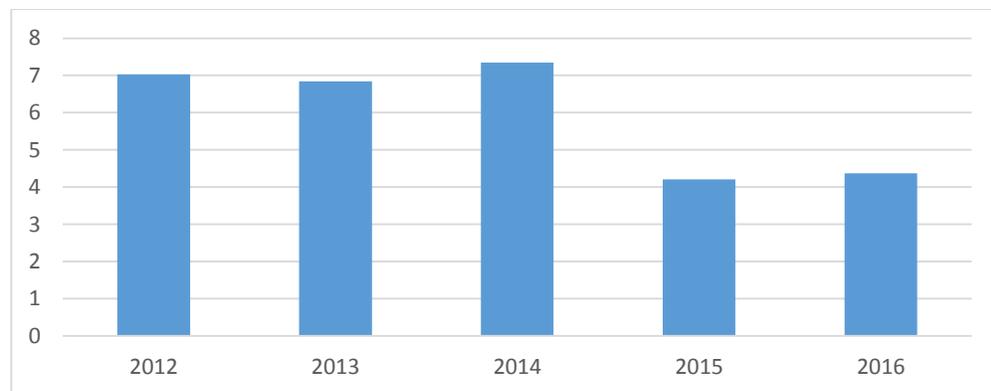
UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang kebijakan otonomi daerah. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan diadakannya otonomi daerah ini adalah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pendapatan. UU No. 9 Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan mengandalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan karakteristik masyarakatnya sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kemajuan perekonomian disuatu daerah adalah bukti pencapaian dari adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian yang berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dilakukan dengan menghitung

PDRB rata-rata yang tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Adanya Keterlambatan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh adanya sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar namun pertumbuhannya dapat dikatakan lamban. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dengan cepat apabila dipengaruhi oleh adanya sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap totalitas dan tumbuhnya sangat pesat. Analisis yang diperoleh dari PDRB merupakan salah satu alat untuk mengukur kontribusi sektor ekonomi dalam menunjukkan kemampuan sumber daya yang dimiliki disuatu daerah.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada dipulau Sumatra. Jambi adalah salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang nama ibu kotanya sama dengan nama provinsinya setelah Bengkulu dan Gorontalo. Belakangan ini banyak terdengar isu-isu tentang pembangunan yang dilakukan Provinsi Jambi salah satunya adalah isu tentang tingginya tingkat pengangguran yang semakin bertambah dan angka kemiskinan yang mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jambi berusaha membuat kebijakan ekonomi yang berfokus pada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jambi adalah deviasi dari tujuan kebijakan yang dilakukan pada pembangunan ekonomi nasional (RPJM Nasional) yakni dengan menggunakan potensi yang dimiliki daerah seperti sumberdaya dan kearifan local pada lapisan masyarakat di Provinsi Jambi.

Secara menyeluruh, tujuan dari kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2011-2015 antara lain: 1) terciptanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi yang memiliki kualitas yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pada seluruh masyarakat serta terciptanya pemerataan pendapatan, 2) menciptakan adanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan, 3) melaksanakan pemerintahan yang jujur dengan menjunjung tinggi penerapan pada prinsip-prinsip yakni: akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, supremasi hukum, efektivitas, keadilan, dan keterbukaan.



Sumber : BPS Provinsi Jambi

GAMBAR 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi Tahun 2012-2016 (persen)

Gambar 1.1 di atas menggambarkan kondisi perekonomian Provinsi Jambi tahun 2012-2016 yang sangat berfluktuatif. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sebesar 7,03 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 6,84 persen. Pada

tahun 2014 justru pertumbuhan ekonomi di Jambi mengalami kenaikan sebesar 7,35 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi di Jambi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 4,21 persen. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 4,37 persen. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, diantaranya adalah menurunnya harga komoditas internasional, depresiasi nilai tukar, ketidakpastian pasar keuangan, serta menurunnya daya beli masyarakat.

Kabupaten Batang Hari adalah salah satu dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Kabupaten Batang Hari memiliki luas wilayah sebesar 5.804 kilometer persegi dan merupakan Kabupaten terbesar ke empat dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 127.614 jiwa dan laki-laki sebesar 133.017 dengan total jumlah penduduk sebesar 260.631 jiwa pada tahun 2015. Kabupaten Batang Hari sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah, memiliki kewenangan yang sangat luas dalam merencanakan, mengelola, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada secara optimal yang kemudian dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten Batang Hari.

TABEL 1.1
Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Tahun 2012-2016

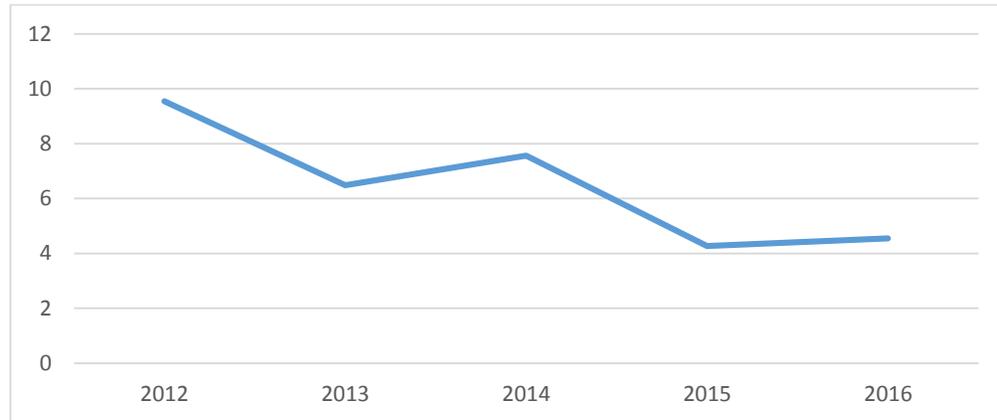
Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutan, dan Perikanan	39.20	38.37	40.09	40.10	40.09
Pertambangan dan Penggalian	15.96	16.07	14.69	14.08	13.90
Industri Pengolahan	12.78	12.97	12.81	12.64	12.36
Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
Konstruksi	6.17	6.66	6.62	6.74	6.80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.02	7.09	7.09	7.36	7.57
Transportasi dan Pergudangan	1.52	1.49	1.46	1.49	1.51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.30	0.29	0.34	0.35	0.37
Informasi dan Komunikasi	2.65	2.62	2.61	2.71	2.78
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.91	2.00	1.91	1.88	1.83
Real Estate	1.34	1.30	1.23	1.22	1.20
Jasa Perusahaan	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.83	3.80	4.02	4.10	4.13
Jasa Pendidikan	4.78	4.80	4.53	4.63	4.71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.19	1.22	1.29	1.37	1.40
Jasa Lainnya	1.14	1.12	1.10	1.13	1.13
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Batang Hari 2016

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa semua sektor memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Batang Hari. Jika dilihat dari penciptaan nilai tambah untuk pertumbuhan PDRB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi terbesar diantara sektor yang lainnya.

Tahun 2012 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 39.20 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 38.37 persen. Kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 40.09 persen dan kembali meningkat menjadi 40.10 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016 sektor ini mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 40.09 persen. Meskipun nilai yang diperoleh mengalami naik turun, tetapi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih relatif stabil.

Selanjutnya sektor yang berkontribusi terbesar kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2012, sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 15.96 persen. Kemudian meningkat menjadi 16.07 persen pada tahun 2013. Tahun 2014, 2015, dan 2016, sektor pertambangan dan penggalian justru mengalami penurunan setiap tahunnya. Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor industri pengolahan. Sama seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor ini cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2012 sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 12.78 persen dan pada tahun 2016 sebesar 12.36 persen. Kontribusi terkecil ada pada sektor pengadaan listrik dan gas, dimana setiap tahun pada sektor ini tidak mengalami peningkatan, angkanya selalu tetap namun kontribusinya sangat kecil, yaitu sebesar 0.04 persen pada tahun 2012-2014 dan 0.05 persen pada tahun 2015-2016.



Sumber : BPS Kabupaten Batang Hari

GAMBAR 1.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Hari Tahun 2012-2016 (persen)

Periode tahun 2012 hingga 2016, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang Hari tidak stabil. Perekonomian Kabupaten Batang Hari pada tahun 2012 sebesar 9,54 persen kemudian menurun pada tahun 2013 sebesar 6,48 persen kembali mengalami peningkatan menjadi 7,56 persen pada tahun 2014. Tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang Hari kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 4,27 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 4,55 persen. Kenaikan atau penurunan pada pertumbuhan tersebut disebabkan adanya berbagai kebijakan yang kurang efektif dalam bidang usaha antara lain naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), tingginya tingkat suku bunga bank, serta disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang kurang baik.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan, maka yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah dimana akan terjadi peningkatan pada pertumbuhan jumlah penduduk di setiap tahunnya serta membutuhkan kebutuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu agar kebutuhan ekonomi tersebut dapat terpenuhi perlu adanya orientasi pada peningkatan daerah dengan cara melakukan peningkatan pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PDRB. Artinya peran pemerintah sangat penting dalam rangka memfokuskan kegiatan pengembangan pada sektor-sektor potensial yang dimiliki daerah tersebut yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi tinggi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan analisis dan mengkaji lebih mendalam mengenai **“Analisis Sektor Ekonomi Basis Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Strategi Pengembangannya: Studi Kasus Kabupaten Batang Hari Tahun 2012-2016”**

A. Batasan Masalah Penelitian

Dikarenakan ruang lingkup pembangunan ekonomi daerah yang sangat luas, maka dalam penelitian ini peneliti memberi batasan masalah pada mengkaji sektor-sektor dan beberapa sub sector ekonomi pada Kabupaten Batang Hari sebagai indikator yang dilihat dari nilai Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan berdasarkan data tahun 2012-2016.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sektor apakah yang memiliki potensi sebagai sektor basis serta yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing dan spesialisasi dengan bantuan alat analisis *Location Quotient (LQ)* dan *Shift Share*?
2. Sektor manakah yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan dengan memanfaatkan alat analisis *Klassen Typology*?
3. Bagaimana strategi pengembangan sektor unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah dengan menggunakan analisis SWOT?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sektor yang memiliki potensi sebagai sektor basis serta yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing dan spesialisasi dengan bantuan alat analisis *Location Quotient (LQ)* dan *Shift Share*.

2. Untuk mengetahui Sektor yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan pembangunan dengan memanfaatkan alat analisis *Klassen Typology*.
3. Untuk mengetahui strategi pengembangan sektor unggulan dan non unggulan untuk pembangunan wilayah dengan menggunakan SWOT.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis memperoleh pemahaman yang lebih tentang pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah yang nantinya diharapkan dapat diterapkan pada keadaan nyata di lapangan.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian khususnya mengenai topik sektor ekonomi basis serta diharapkan dapat mejadi acuan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberikan kontribusi pemikiran serta sebagai bahan yang dapat dipakai dalam membuat kebijakan pemerintah daerah terutama dalam bidang ekonomi.